

## STRATEGI PROMOSI KESEHATAN DALAM PENGEMBANGAN “POLISI ASI” SEBAGAI PENERAPAN MODEL UPAYA KESEHATAN BERSUMBERDAYA MASYARAKAT (UKBM) DI KABUPATEN TORAJA UTARA

Theolinda Taula’bi<sup>1</sup>, Andi Asrina<sup>2</sup>, Afrianty Gobel<sup>3</sup>

Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

\*E-mail: [theolindataulabi@gmail.com](mailto:theolindataulabi@gmail.com)

*Patria Artha Journal of Nursing Science*

2019. Vol. 3(2) 109-117

Issn: 2549 5674

e-issn: 2549 7545

Reprints and permission:

<http://ejournal.patria-artha.ac.id/index.php/jns>

---

### Abstrak

ASI eksklusif memiliki kontribusi yang besar terhadap tumbuh kembang dan daya tahan anak. Anak yang diberi ASI eksklusif akan tumbuh dan berkembang secara optimal, tidak mudah sakit. **Tujuan:** untuk mendapatkan informasi, menganalisa dan mengkaji secara mendalam tentang strategi Promosi Kesehatan dalam penerapan model Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) Polisi ASI di kabupaten Toraja Utara. **Metode Penelitian:** Jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode fenomenologi untuk mengeksplorasi strategi yang digunakan dalam keberhasilan peningkatan cakupan ASI Eksklusif dengan adanya Polisi ASI. Teknik yang digunakan yaitu observasi, wawancara mendalam, FGD dan dokumentasi selama penelitian berlangsung. **Hasil:** Berdasarkan penelitian adanya bentuk dukungan dan terbentuknya model UKBM Polisi ASI yang ditetapkan melalui Surat Keputusan serta terbitnya regulasi yang mengatur tentang pemberian ASI eksklusif dan sanksi bagi yang melanggar. **Implikasi penelitian :** Berdasarkan penelitian bahwa advokasi kepada pengambil kebijakan selain kepada pemerintah setempat juga kepada tokoh masyarakat/adat dan tokoh agama telah dilakukan oleh petugas puskesmas. **Rekomendasi :** adanya dukungan dari kepala lembang sebagai penentu kebijakan dan dukungan dari tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam model UKBM Polisi ASI.

**Kata kunci:** *UKBM, Advokasi, Polisi ASI*

---

### PENDAHULUAN

Strategi Promosi Kesehatan merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah kesehatan. Berbagai masalah kesehatan yang ada termasuk masih rendahnya cakupan ASI Eksklusif sehingga dilakukan upaya untuk meningkatkan cakupan pemberian ASI Eksklusif pada bayi.

Pemberian air susu ibu (ASI) saja tanpa makanan pendamping lainnya selama

enam bulan pertama merupakan bagian terpenting dalam sumberdaya manusia. ASI eksklusif merupakan makanan utama yang terbaik untuk bayi 0 sampai 6 bulan karena mengandung semua zat makanan dengan komposisi yang sesuai dengan kebutuhan bayi, kemudian dilanjutkan sampai umur 2 tahun. Menurut WHO ASI Eksklusif adalah pemberian ASI saja pada bayi sampai umur 6 bulan tanpa tambahan cairan ataupun makanan lain. Air Susu Ibu mempunyai dampak positif besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan

termasuk jaringan otak serta daya tahan tubuh pada anak.

ASI eksklusif memiliki kontribusi yang besar terhadap tumbuh kembang dan daya tahan anak. Anak yang diberi ASI eksklusif akan tumbuh dan berkembang secara optimal, tidak mudah sakit. Hal ini sesuai dengan kajian global *The lencet breastfeeding series* tahun 2016, membuktikan menyusui eksklusif menurunkan angka kematian karena infeksi sebanyak 88% pada bayi berusia kurang dari 3 bulan, menurunkan resiko kegemukan dan penyakit kronis (Pedoman Penyelenggaraan pekan ASI sedunia, 2017). Apabila pada periode tersebut bayi dipaksa menerima makanan tambahan selain ASI maka akan membahayakan karena bayi belum mampu memproduksi enzim untuk mencerna makanan selain ASI sehingga akan terjadi kembung, diare dan kemungkinan terkena ISPA lebih besar dibandingkan dengan yang mendapat ASI eksklusif.

Data capaian ASI eksklusif yang rendah kabupaten Toraja Utara ditahun 2013 sebanyak 17,9% dengan target kabupaten 80%.

Hasil pendataan PHBS di lembang Pata'padang tahun 2014 capaian ASI Eksklusif 58,3 % dari target Standart Pelayanan Minimal (SPM) kabupaten Toraja Utara 80 % dan memberikan data bahwa masih banyak ibu yang tidak menyusui bayinya.

Berbagai analisis yang dilakukan oleh petugas kesehatan terkait masalah rendahnya capaian ASI eksklusif sehingga dilakukan advokasi ke penentu kebijakan. Advokasi ini bertujuan untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah setempat berupa regulasi.

Penelitian (Ardiana dkk, 2017) menjelaskan bahwa advokasi merupakan penguatan berupa kebijakan melalui pendekatan kepada para pembuat keputusan atau penentu kebijakan di berbagai sektor sehingga mau mendukung program kesehatan yang kita inginkan

berupa kebijakan, undang-undang, peraturan pemerintah, surat keputusan, instruksi dan sebagainya.

Bentuk upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) dianggap sesuai karena dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat, dikelola, oleh, dari dan untuk masyarakat dengan bimbingan petugas kesehatan dan lembaga terkait lainnya. Model polisi ASI merupakan salah satu bentuk model dari UKBM yang ada di lembang Pata'padang. Model UKBM Polisi ASI yang dibentuk pada tahun 2014 sebagai salah satu solusi upaya meningkatkan capaian ASI eksklusif.

Pembentukan polisi ASI pada pertemuan musyawarah lembang tahunan, kepala lembang dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, masyarakat dan petugas kesehatan dari puskesmas TombangKalua' di lembang Pata'padang. Berdasarkan hasil pendataan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) mengangkat masalah indikator ASI Eksklusif. Sehingga dirasa perlu membentuk satu tim pemantau ASI Eksklusif yang akan memantau dan membantu ibu hamil serta ibu menyusui dalam memberikan ASI eksklusif.

Tim ini terdiri dari delapan orang yaitu satu orang koordinator (bidan desa Pata'padang) dan tujuh orang anggota yang terdiri dari masyarakat, dengan tugas dan tanggung jawab Polisi Asi yaitu memantau ibu hamil, ibu menyusui dan bayi baru lahir sebagai upaya peningkatan cakupan ASI eksklusif. Kegiatan pemberdayaan masyarakat upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yang diterapkan di lembang Pata'padang berupa polisi ASI kemudian membawa kabupaten Toraja Utara sebagai juara dua tingkat nasional inovasi desa dan juara satu tingkat provinsi dan kabupaten tahun 2016 melalui gerakan inovasi bidang kesehatan yaitu Polisi ASI.

Data cakupan ASI Eksklusif tahun 2013 kabupaten Toraja Utara sebanyak 17, 9 %, kemudian tahun 2014 turun menjadi 16 % dan 45 % pada tahun 2015 (Profil Tahunan Program Promosi Kesehatan Dinas

Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan). Masih jauh dari target Nasional yaitu 80%. Dukungan pemerintah setempat berupa edaran kabupaten Toraja Utara pemberian ASI Eksklusif nomor 441/0563/Dinkes tahun 2015 yang isinya mengatur tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengembangan program ASI diantaranya menetapkan kebijakan nasional dan daerah, melaksanakan advokasi dan sosialisasi serta melakukan pengawasan terkait program pemberian ASI Eksklusif.

Berdasarkan data awal yang didapatkan dari dinas kesehatan kabupaten Toraja Utara bahwa dengan adanya polisi ASI di lembang Pata'padang membawa peningkatan cakupan ASI Eksklusif pada tahun 2014 sebanyak 58,3%, tahun 2015 sebanyak 84 %, tahun 2016 sebesar 91% dan tahun 2017 sudah mencapai 96% melampaui target capaian yaitu 80%.

Keberhasilan ini kerjasama dan partisipasi antara masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, pengambil kebijakan dan polisi ASI sendiri. Peningkatan capaian ini tidak terlepas dari strategi promosi kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Berdasarkan uraian keberhasilan sebelumnya sehingga peneliti tertarik dengan penerapan model polisi ASI di lembang Pata'padang kabupaten Toraja Utara.

**METODE**

Penelitian ini dilakukan di Lembang Pata'padang Kecamatan Sanggalangi' Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan, pada bulan Oktober 2018. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode fenomenologi untuk mengetahui strategi-strategi yang digunakan dalam keberhasilan peningkatan cakupan ASI Eksklusif dengan adanya polisi ASI. Teknik yang digunakan yaitu teknik observasi, *indepth interview* (wawancara mendalam), FGD dan dokumentasi selama penelitian berlangsung. Sumber data pada penelitian ini adalah informan biasa sebanyak 6 orang,

informan pendukung 6 orang dan informan kunci 1 orang.

**HASIL**

**1. Latar Belakang Informan**

Informan	Umur	JK	Pendidikan Terakhir
DP	46	P	S1
SS	43	P	S1
SR	47	P	SMA
YS	40	P	D3
RY	29	P	S1
HR	30	P	S1
AL	41	L	S2
MT	47	L	S1
AS	55	P	S1
MS	47	L	S1
MR	35	P	D3
AD	25	P	SMA
AO	46	L	S1

Tabel tersebut menggambarkan tentang latar belakang informan yang menunjukkan bahwa rentang usia informan berada antara 25 - 55 tahun. Empat orang berjenis kelamin laki-laki dan sembilan orang berjenis kelamin perempuan. Adapun latar pendidikan bervariasi yaitu SMA, Diploma 3, S1 dan S2.

**2. Informasi mengenai Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat**

Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) secara umum merupakan suatu upaya atau proses untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan, serta kemampuan masyarakat dalam rangka mengenal, mengatasi, memelihara, melindungi, serta meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Sebuah kegiatan dapat dikategorikan sebagai UKBM apabila dapat menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan dan kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri, bukan kegiatan yang segala sesuatunya diatur dan disediakan oleh pemerintah maupun pihak lain.

UKBM sebagai salah satu wujud nyata peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan. Model UKBM Polisi ASI

terbentuk sebagai kegiatan inovasi dalam pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. Terbentuknya Polisi ASI sebagai model UKBM sesuai dengan prinsip UKBM bahwa kegiatan yang terbentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat, dari, oleh dan untuk masyarakat.

Pendekatan suatu program / kegiatan kepada masyarakat memerlukan suatu model nyata yang mudah dilakukan secara mandiri oleh masyarakat. Kemudian model UKBM Polisi ASI muncul sebagai jawaban yang didapatkan sendiri oleh masyarakat. Selama ini model UKBM yang masih ada yaitu posyandu dan posbindu, sehingga masyarakat lembang Pata'padang mencari model lainnya yang dianggap dapat memberi suasana baru dan dekat dengan masyarakat serta bisa mengatasi masalahnya sendiri.

Keberhasilan model UKBM tidak lepas dari strategi yang digunakan sehingga tujuan penelitian ini untuk mendapatkan informasi strategi promosi yang digunakan. Strategi promosi kesehatan berupa advokasi, bina suasana, pemberdayaan masyarakat dan kemitraan yang digunakan dalam pembentukan Polisi ASI sebagai penerapan model UKBM untuk meningkatkan cakupan ASI eksklusif di lembang Pata'padang Kabupaten Toraja Utara.

### 3. Informasi mengenai advokasi

Informasi yang didapatkan dalam penelitian ini adalah bentuk advokasi yang digunakan berupa penyampaian masalah kepada pengambil kebijakan seperti yang diungkapkan :

*"Awalnya kami diundang ke rapat musyawarah desa yang dihadiri oleh kepala lembang, tokoh masyarakat, tokoh agama, petugas puskesmas dan masyarakat. Kemudian saya bilang kalau masih banyak bayi yang tidak diberi ASI eksklusif dengan alasan yang bermacam-macam..."* (YS, 40 tahun, wwc tanggal 13 Oktober 2018)

Bagian dari advokasi adalah pada saat sasaran menyadari, peduli dan tertarik mengatasi suatu masalah secara bersama-

sama sesuai dalam hasil wawancara FGD berikut :

*"...e..kami semua merasa bahwa ASI eksklusif sebagai suatu masalah dan kami mencoba untuk mencari jalan keluarnya. Terus kami sepakat mengusulkan mungkin lebih baik kalau ada orang yang bertugas kerumah-rumah penduduk untuk mengawasi dan memantau ibu menyusui. e..awalnya ada yang menyarankan mungkin pengawas ASI, pemantau ASI tetapi dirasa kurang ditakuti oleh masyarakat kemudian ada yang mengusulkan kata "Polisi ASI" karena dianggap selain lebih ketat pengawasannya memang mirip dengan Polisi kalau tugasnya akan mengawasi ibu menyusui. Maka dipilihlah istilah itu..(sambil tertawa)"*(MM, 50 tahun, wwc tanggal 27 Oktober 2018)

Masalah dan hambatan yang dihadapi dalam advokasi terungkap dalam wawancara berikut ini :

*"Awalnya susah juga untuk mengajak orang mendukung rencana pembentukan Polisi ASI apalagi mau mengikuti saran yang kita berikan, kalau datang kerumah ibu kadang mereka memberi alasan bahwa mereka pakai susu formula yang mahal karena yakin mengandung gizi yang lebih lengkap, ada juga yang mengatakan bahwa takut bentuk payudaranya tidak bagus lagi, atau ibu bekerja. Tapi kami tidak putus asa tetap datang terus berkunjung kerumah ibu"*(SS, 43 tahun, wwc tanggal 13 Oktober 2018)

Lebih lanjut disampaikan oleh informan :

*"..Pada saat musyawarah desa (MMD) kami memaparkan hasil data PHBS sebagai cermin keadaan kesehatan di lembang Pata'padang. Kemudian dari situ kami bersama-sama dengan peserta rapat melihat indikator ASI eksklusif sebagai masalah kesehatan dan menyepakati bersama sebagai masalah bersama di lembang Pata'padang..."*(RY, 29 tahun, wwc tanggal 12 Oktober 2018)

Advokasi merupakan adanya komitmen dukungan dari pengambil kebijakan berupa adanya regulasi, aturan, peraturan daerah atau surat keputusan untuk

mendukung suatu program seperti kutipan wawancara berikut :

*“...e...dari hasil rapat kami tersebut kemudian saya membuatkan satu surat keputusan yang isinya disepakati bersama dan dikonsepsi bersama. E..aturan tersebut berupa pembentukan Polisi ASI lengkap dengan tugas pokok dan sanksi bagi yang melanggar. Sanksi tersebut juga merupakan hasil keputusan kami bersama dan hanya mengikat bagi masyarakat penduduk asli yang tinggal di lembang Pata’padang. Bagi orang lain yang kebetulan datang, melahirkan, dan punya bayi tidak berlaku...”*(MT, 47 tahun, wawancara tanggal 13 Oktober 2018)

## PEMBAHASAN

Advokasi merupakan strategi pendekatan untuk mempengaruhi para pengambil keputusan agar dapat memberikan dukungan maksimal terhadap suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan. Bentuk pendekatan yang dilakukan petugas kesehatan puskesmas dalam hal ini penanggung jawab kegiatan Promosi Kesehatan adalah melakukan advokasi dengan memaparkan hasil pendataan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dimana indikator ASI Eksklusif yang paling rendah dibanding indikator lainnya dijadikan sebagai masalah untuk lembang Pata’padang. Penyampaian hasil pendataan PHBS ini merupakan salah satu bentuk kepedulian dan kemandirian masyarakat dalam menemukan masalah yang ada kemudian menjadi bahan untuk advokasi oleh tenaga kesehatan kepada pengambil kebijakan.

Penelitian (Ajikeristianto, 2013) menyatakan advokasi adalah upaya pendekatan terhadap orang lain yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan. Sama halnya yang diungkapkan oleh bidan desa lembang Pata’padang yaitu masih banyak bayi yang tidak mendapat ASI eksklusif sehingga cakupan ASI eksklusif masih rendah (58,3%). Pernyataan ini dikuatkan oleh kader sesuai dengan keluhan masyarakat dalam rapat desa bahwa banyak alasan

yang disampaikan sehingga ibu-ibu tidak memberikan ASI secara eksklusif.

Saat sasaran dari advokasi menyadari apa yang disampaikan merupakan suatu masalah artinya tujuan dari advokasi ini tercapai. Informasi yang disampaikan kemudian dicarikan solusinya pada pertemuan tersebut dan didapatkan kesepakatan akan adanya tim pemantau ASI.

Sesuai dengan kegiatan advokasi yaitu usaha untuk mendapatkan atau menciptakan perhatian terhadap sesuatu permasalahan atau isu yang penting dan mengarahkan para pembuat keputusan untuk langsung membuat pemecahannya. Proses advokasi tersebut dimana Kepala Lembang, tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai pengambil keputusan dalam musyawarah desa dan menetapkan ASI eksklusif sebagai masalah kesehatan bersama.

Pembentukan tim Polisi ASI dianggap mampu mengatasi masalah ASI Eksklusif di lembang Pata’padang. Kegiatan pemantauan ASI eksklusif pada ibu menyusui pada awalnya tidak langsung diterima oleh masyarakat. Banyak alasan yang disampaikan untuk menolak penggunaan ASI eksklusif baik itu dari ibu atau dari keluarga lainnya sesuai dengan yang disampaikan oleh informan. Diantaranya bayi yang diasuh oleh nenek, adanya anggapan bahwa susu formula yang mahal mempunyai kandungan gizi yang lebih baik, ada juga yang tidak ingin menyusui bayinya karena takut bentuk payudara akan berubah. Kemudian dibicarakan bentuk kegiatan apa yang akan dilakukan untuk memantau lebih lanjut kegiatan menyusui di lembang Pata’padang.

Proses akhir dari kegiatan advokasi yaitu harapan akan adanya dukungan dari pengambil keputusan. Dukungan yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu dukungan dari kepala lembang sebagai penentu kebijakan dan dukungan dari tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam model UKBM Polisi ASI.

Penentuan kriteria untuk menjadi tim Polisi ASI juga berdasarkan kesepakatan bersama dengan berbagai pertimbangan. Penentuan nama-nama anggota tim Polisi ASI ditetapkan dalam surat keputusan. Kemudian dari hasil rapat lembang disusunlah draft susunan regulasi masyarakat dan tokoh agama.

Sejalan penelitian (Hidayat, 2018) menyatakan kemampuan melobi para pemangku kebijakan untuk mendukung kegiatan dan program yang akan dijalankan dalam bentuk mengeluarkan aturan dan sanksi yang tegas dalam penyelenggaraan kegiatan bagian dari advokasi. Pernyataan ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh petugas kesehatan sehingga Kepala lembang membuatkan satu aturan berupa Surat Keputusan (SK) yang mengatur tentang kebijakan dan sanksi ASI eksklusif.

Sebagai hasil advokasi pada tahap ini adanya regulasi dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Kepala Lembang. Hasil observasi data sekunder adanya Surat Keputusan Kepala lembang dicap dan ditandatangani No. 13.a/SK/LPP/V/2014 tentang Pembentukan Kelompok Polisi ASI. Pembentukan tim Polisi ASI ini juga mendapat dukungan dari kepala kecamatan seperti yang diungkapkan dalam wawancara.

Dukungan yang sama diberikan oleh kepala puskesmas selaku informan kunci yang ikut terlibat dalam rapat pembentukan Polisi ASI dan adanya kebanggaan atas terbitnya regulasi terkait kesehatan. Hasil ini sama dengan pengertian dan tujuan advokasi untuk mendapatkan dukungan kebijakan secara tertulis dalam bentuk peraturan. Advokasi adalah aksi yang strategis dan terpadu oleh perorangan atau kelompok masyarakat untuk memasukkan suatu masalah kedalam agenda kebijakan.

Selain kebijakan dalam mengontrol para pengambil keputusan untuk mengupayakan solusi bagi masalah sekaligus membangun dukungan bagi

penegakan dan penerapan kebijakan publik yang dibuat untuk mengatasi masalah tersebut (Sunarto, 2017). Adapun dari kebijakan tersebut kemudian dibuatkan aturan sanksi bagi yang tidak patuh. Sanksi ini diharapkan mempunyai efek jera dengan bentuk sanksi berupa tidak adanya pelayanan administrasi dari Lembang Pata'padang bagi keluarga yang melanggar.

Pada tahap pelaksanaan model UKBM Polisi ASI yaitu terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat dan diterimanya keputusan akan pembentukan Polisi ASI. Sosialisasi pembentukan Polisi ASI yang dilakukan oleh Kepala Kecamatan, Kepala Lembang, tokoh masyarakat dan tokoh agama sama dengan tujuan advokasi yaitu diterimanya suatu program oleh masyarakat.

Sosialisasi yang disampaikan tentang aturan yang ada, dalam hasil penelitian ini dianggap berhasil karena aturan dan sanksi yang ada bukan hanya diketahui oleh ibu menyusui tetapi juga masyarakat lainnya. Sosialisasi ini berjalan baik dengan adanya informasi dari informan dan hasil observasi bahwa tidak ada lagi warung yang menjual susu formula untuk bayi 0 sampai 6 bulan.

Setelah adanya pembentukan dan pelaksanaan kegiatan Polisi ASI maka kegiatan advokasi tetap berjalan. Advokasi yang dilakukan oleh petugas Promotor Kesehatan Puskesmas berupa advokasi kepada kepala kecamatan dan Kepala Lembang lainnya untuk dapat mereplikasi model Polisi ASI. Hasil dari advokasi tersebut yaitu adanya kesepakatan yang dibuat untuk masing-masing lembang yang ada di kecamatan Sanggalangi' untuk mereplikasi model Polisi ASI yang dituangkan kedalam nota kesepakatan bersama.

Sama halnya dengan advokasi sebelumnya yang dilakukan oleh petugas promosi kesehatan dalam hal ini promotor kesehatan, replikasi model untuk semua lembang ini mendapat dukungan dari semua tokoh masyarakat dan tokoh

agama. Dukungan ini salah satu bentuk dari hasil advokasi.

Berdasarkan analisa penulis sesuai informasi yang didapatkan dilapangan, kegiatan advokasi yang dilakukan di lembang Pata'padang mulai dari pembentukan, proses dan setelah adanya pelaksanaan kegiatan Polisi ASI selain ditentukan oleh pemerintah setempat juga melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Dalam kehidupan bermasyarakat pada budaya Toraja pengambilan keputusan untuk orang banyak sangat banyak ditentukan oleh keputusan To Parengnge' (tokoh adat/tokoh masyarakat) sehingga advoksi yang dilakukan oleh petugas kesehatan melibatkan tokoh adat dianggap sudah tepat.

Demikian pula pada saat pelaksanaannya kegiatan sosialisasi banyak dilakukan pada waktu acara adat rambu solo' (kedukaan) dan rambu tuka' (sukacita). Kegiatan ini dipilih karena kepercayaan masyarakat Toraja kepada To parengnge' dan tokoh agama sangat tinggi, pesan yang disampaikan pada saat kegiatan adat dianggap sebagai keharusan yang wajib diikuti oleh masyarakat. Pada acara adat juga dimana sifat kekeluargaan dan kegotongroyongan masyarakat Toraja sangat tinggi sehingga banyak dihadiri oleh masyarakat. Penyampaian informasi untuk orang banyak (massa) lebih mudah dilakukan pada acara adat.

Sama halnya dengan keterlibatan tokoh agama, dimana masyarakat Toraja adalah mayoritas beragama Kristen maka tokoh agama (pendeta) masih mempunyai peranan yang penting. Dalam susunan kasta masyarakat Toraja para pendeta mempunyai kedudukan tempat tersendiri dan dianggap sebagai penasehat dalam bermasyarakat. Informasi apa yang disampaikan oleh pendeta dipercaya sebagai hal yang baik bagi setiap orang. Advokasi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan melibatkan tokoh agama sudah tepat sehingga penyampain informasi/sosialisasi terkait ASI eksklusif

cepat sampai dan diterima oleh masyarakat.

Dukungan maksimal yang diberikan oleh tokoh agama juga dilihat dengan penggunaan lokasi gereja sebagai tempat pelaksanaan kegiatan posyandu setiap bulannya serta sosialisasi terkait ASI eksklusif yang disampaikan pada saat ibadah hari minggu dan ibadah rumah tangga. Dukungan ini menjadi salah satu faktor penunjang keberhasilan dalam kegiatan Polisi ASI dilembang Pata'padang.

## **KESIMPULAN**

Advokasi dalam Strategi Promosi Kesehatan dalam pembentukan Polisi ASI sebagai penerapan model UKBM di kecamatan Sanggalangi' kabupaten Toraja Utara mulai proses hingga pembentukan yang telah dilakukan kepada pengambil keputusan menghasilkan dukungan dan regulasi tentang Polisi ASI. Keberhasilan dari advokasi ini adalah dengan melibatkan to Parengnge' (tokoh masyarakat) dan tokoh agama kedalam semua tahap kegiatan dimana dalam masyarakat Toraja kedudukan tokoh masyarakat dan tokoh agama masih memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan.

Penelitian ini merekomendasikan keberhasilan suatu strategi promosi kesehatan advokasi tidak lepas dari budaya setempat dengan melibatkan dukungan tokoh adat/tokoh masyarakat .

## **Daftar Pustaka**

- Andi Asrina, Palusturi S, Andayani E, dkk. (2018). *Culture adn Health behavior of Buton Society of Baubau City Southeast Sulawesi*
- Afrizal. (2017). *Metode Penelitian kualitatif*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Aningsih, S., dkk. (2016). *Pemberdayaan*

- Masyarakat Desa dalam Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Melalui Peraturan Desa di Kabupaten Bayuwangi*. Jurnal kesehatan Masyarakat.
- Ardiana, P., dkk. (2017). *Strategi Promosi Kesehatan dalam Upaya Penurunan Angka Kematian Ibu di Kota Pekalongan*. Jurnal Kesehatan Masyarakat.
- Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Direktorat Jenderal Kesehatan Kementerian Kesehatan R.I. (2017). *Promosi kesehatan Komitmen Global dari Ottawa Jakarta Shanghai menuju Rakyat Sehat*. Jakarta.
- Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. (2013). *Panduan Peserta Pelatihan Konseling Menyusui*. Makassar.
- Departemen Kesehatan Direktorat Jenderal Bina Gizi Masyarakat. (2007). *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 747/Menkes/SK/VI/2007 tentang Pedoman Operasional Keluarga Sadar Gizi di Desa Siaga*. Jakarta.
- Diyah, H.Y., dkk. (2015). *Pemberdayaan Kader Posyandu dalam Program ASI Eksklusif di Desa Pamijen Sokaraja Banyumas*. Jurnal Ilmiah Ilmu kesehatan Vol.13/ No.1.
- Firman, P.Y. (2016). *Strategi Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pemahaman perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Puskesmas Mangkurawang*. Jurnal Ilmu Komunikasi Vol.4/ No.1.
- Hamidah, S. (2016). *Hubungan Antara Dukungan keluarga dengan Pemberian ASI Eksklusif pada Bayi Usia 0 Sampai 6 Bulan*. Jurnal Kesehatan Vol.8/ No.1.
- Iskardarsyah, N. (2016). *Pelaksanaan Strategi Promosi Kesehatan dalam Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan Rumah Tangga di puskesmas Puwatu Kota Kendari Tahun 2015*. Kementerian Kesehatan R.I Pusat Promosi Kesehatan Masyarakat. (2013). *Modul teknologi Advokasi Kesehatan bagi Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli*. Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2011. *Promosi Kesehatan di daerah Bermasalah Kesehatan*. Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2014). *Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif*. Pusat Promosi Kesehatan. Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2014). *Pedoman Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat di Desa dan Kelurahan Siaga Aktif*. Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2017). *Panduan dana Desa Untuk Bidang Kesehatan*. Jakarta.

- Kementerian Kesehatan R.I Pusat Promosi Kesehatan. 2014. *Panduan Orientasi Kader*. Jakarta. Kementerian Kesehatan R.I. 2015.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan*. Jakarta.
- Kementerian Kesehatan R.I. (2011). *Pedoman kader Seri Kesehatan Anak*. Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Pusat Promosi Kesehatan. (2012). *Rencana Operasional Promosi Kesehatan Ibu dan Anak*. Jakarta.
- Pusat Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2014).
- Profil Program Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. (2013). Makassar.
- Profil Program Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. (2014). Makassar. Pusat Promosi Kesehatan
- Kementerian Kesehatan R.I. (2014). *Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan*. Jakarta.
- Pranata, S., dkk. (2011). *Pemberdayaan Masyarakat dibidang Kesehatan, Gambaran Peran serta Kader Posyandu dalam upaya Penurunan Angka Kematia Ibu dan Bayi di kota Manado dan Palangkaraya*. Jurnal Buletin Penelitian Sistem Vol.14/No.2.
- Restuastuti, T., dkk. (2017) *Analisis Pemberdayaan Masyarakat dibidang Kesehatan*. Jurnal Kesehatan.
- Sulaeman, S.E., dkk. (2012). *Model Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan. Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional Vol. 7/ No.4*.
- Waryana, (2016). *Promosi Kesehatan, dan Pemberdayaan masyarakat*. Nuha Medika, Jogjakarta.